

**PERANAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DALAM
MENDUKUNG KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKIRPSI

OLEH:

**JUNITA DEWI PRATAMA
158520013**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri, adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 April 2019



Junia Dewi Pratama
Junia Dewi Pratama

15.852.00.13

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan

Di bawah ini:

Nama : Junita Dewi Pratama
NPM : 15. 852. 0013
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Babas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area bentuk menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 April 2019

Yang menyatakan




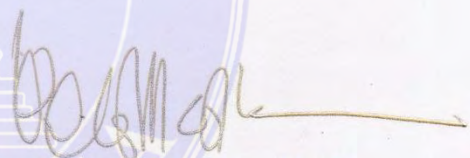
Junita Dewi Pratama
NPM: 15.852.0013

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Utara)
Nama : Junita Dewi Pratama
NPM : 15.852.00.13
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Politik

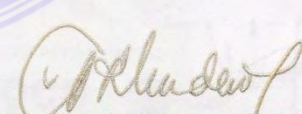
Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. Indra Muda MAP
Pembimbing I


Beby Masitho BB, S.Sos. MAP
Pembimbing II




Dekan
Dr. Heri Kusmanto, MA


Ka. Prodi Administrasi Publik
Dra. Hj. Rosmala Dewi, MPd

Tanggal Lulus : 01 April 2019

ABSTRACT

Democratic Party Faction in North Sumatra Provincial DPRD Performance Planning

Fractions are formed by political parties to optimize the implementation of functions, and others. From the background, the researchers took the title of the Role of the Democratic Party Faction in Supporting the Performance of the Provsu DPRD with the following problems: how the role of the Democratic Party Faction in supporting the performance of the DPRD Provsu, what are the factors that inhibit the Democratic Party Faction in supporting the performance of the Provsu DPRD. This research uses a qualitative descriptive method that uses data collection techniques, observation, interviews, and data triangulation. The results of the discussion explained that the role of the democratic party fraction in supporting the performance of the DPRD had already taken place quite maximally, starting from determining and regulating all matters of fraction, increasing ability, discipline, receiving and channeling people's aspirations, and also the quality and quantity of work, and others. It has been said to be very good, but when viewed from the inhibiting factors, there is still less time discipline and often neglect, wasting time that has been a limiting factor so far and continues to occur until now. Based on the results of the study, it is concluded that the role of the Democratic Party Faction in supporting the performance of the DPRD Provsu in general provides good benefits to council members in improving their performance through the assistance of factions, and inhibiting factors must be addressed immediately so that the level of discipline in time can run well.

Keywords: Role, Fraction, and Performance of DPRD.

ABSTRAK

Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara

Fraksi dibentuk oleh partai politik untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan lainnya. Dari latar belakang peneliti mengambil judul Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja DPRD Provsu dengan masalah sebagai berikut bagaimana peranan Fraksi Partai Demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provsu apa faktor penghambat Fraksi Partai Demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provsu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, triangulasi data. Adapun hasil pembahasan menjelaskan bahwasannya peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD sudah cukup maksimal mulai dari menentukan dan mengatur segala urusan fraksi, meningkatkan kemampuan, disiplin, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga kualitas, kuantitas kerja, dan lainnya sudah dapat dikatakan sangat baik tetapi jika dilihat dari faktor penghambat masih kurang disiplin waktu dan sering melalaikan, mengulur waktu itu yang menjadi faktor penghambat selama ini dan terus terjadi sampai sekarang. Berdasarkan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja DPRD Provsu secara umum memberikan manfaat yang baik kepada anggota dewan dalam meningkatkan kinerja mereka melalui bantuan fraksi dan faktor penghambat harus segera di atasi agar tingkat disiplin dalam waktu dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : Peranan, Fraksi, Dan Kinerja DPRD.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas dan merupakan satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Medan Area. dengan judul **“Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak kendala dan rintangan yang dihadapi oleh penulis. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Drs. Indra Muda, MAP, Ibu Beby Mashito Batu Bara, S.Sos, MAP, selaku dosen pembimbing dan Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, MAP selaku sekretaris yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berarti dan bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral ataupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat cinta dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyelesaian studi pada Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
2. Ibu Dra. Hj. Rosmala dewi, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Indra Muda MAP selaku pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Beby Masitho BB, S.Sos, MAP selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan saran dan arahan dalam penulisan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, MAP selaku sekretaris penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan masukan atau pun arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik dan dosen dari program studi lain yang telah banyak memberikan bimbingan, semangat dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan serta kepada staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan yang telah membantu penulis selama menjalankan skripsi baik dalam membantu melengkapi berkas ataupun bantuan lainnya.
7. Ibu Meilizar Latief SE, MM yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Fraksi Partai Demokrat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Seluruh staff di Kantor Fraksi dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Tasim dan Ibunda Hartatik atas pengorbannya selama ini kepada penulis, baik dari segi materi maupun non materi serta atas segala untaian doa dan nasihat yang terbaik dan kasih sayangnya yang tak terhingga yang selalu bisa memberi masukan, motivasi yang sangat membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan selama perkuliahan terutama selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Teristimewa untuk adik saya tercinta Gilang Kurniawan dan Juraedah Triani yang telah memberikan semangat, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Publik stambuk 2015 khususnya Putri Dita Pratama Marpaung, Balqis Sharah, Khairuni Fatma Siahaan, Rizky Febriyani, Nurhakiki, Ardia Pori, Yesi Artika, Ferisman Gulo, Hefa Yolanda dan teman-teman seluruh Fisip dan semuanya masih banyak lagi yang tak disebutkan namanya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih untuk teman, adik, Kontrakan No. 6 C Jl. Gurilla Gg. Family terkhusus buat putri, aini, lusi, vira, vio, yuni yang selalu memberikan canda dan tawa dan selalu memberikan motivasi bagi saya sehingga bisa selesai skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, karena masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis harapkan dan nantikan. Demikian dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 01 April 2019

Penulis

Junita Dewi Pratama
15.852.00.13



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Peranan	5
2.2 Kinerja	7
2.3 Partai Politik	9
2.3.1 Tujuan Partai Politik	10
2.3.2 Fungsi Partai Politik	11
2.3.3 Klasifikasi Partai Politik	16
2.3.4 Ciri-Ciri Partai Politik	17
2.4 Fraksi	18
2.5 Badan Legislatif dan Fungsi DPRD	21
2.6 Kerangka Pemikiran	24
2.7 Penelitian Relevan	27
BAB III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Waktu Penelitian	31
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Metode Analisis Data	35
3.7 Uji Keabsahan Data	36
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Sejarah Singkat Partai Demokrat	39
4.1.2 Visi Misi Partai Demokrat	43
4.1.3 Tujuan Partai Demokrat	44
4.1.4 Jumlah Pegawai Dan DPRD Fraksi Demokrat	46
4.1.5 Struktur Organisasi Fraksi Demokrat	47

4.1.5.1	Tupoksi Fraksi Demokrat Dan DPRD.....	50
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
4.2.1	Peranan Fraksi Demokrat	54
4.2.2	Faktor Penghambat Fraksi Demokrat	60
BAB V.	SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1	Simpulan.....	64
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		74



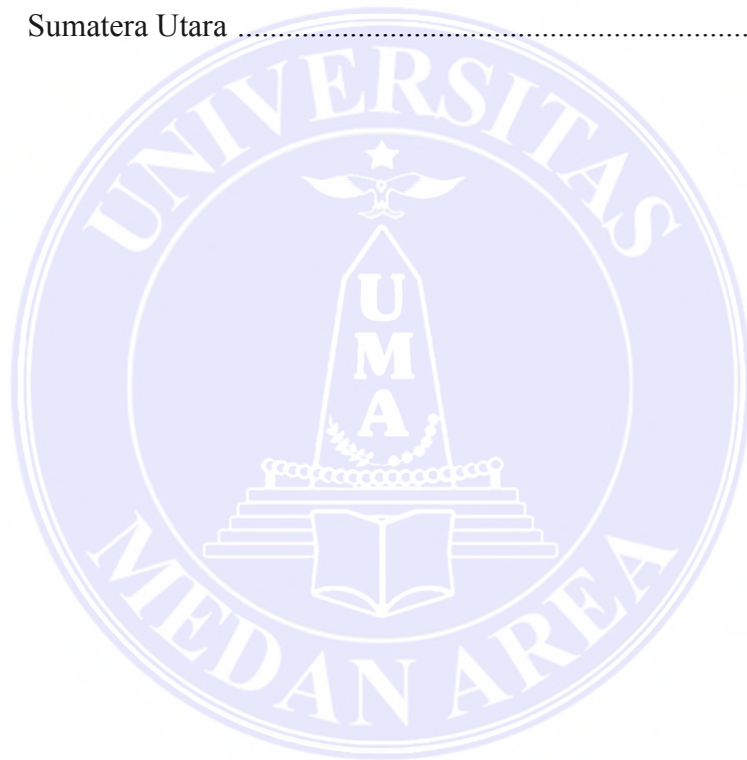
DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	27
Bagan 4.4 Struktur Organisasi Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara	53



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Target Penelitian	32
Tabel 4.1 Daftar Ketua	46
Tabel 4.2 Jumlah Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara	50
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraksi adalah perwakilan partai politik dalam majelis legislatif dan juga berlaku di dewan kota. Istilah fraksi atau (*parlementary party*) pada awalnya di gunakan di Jerman melalui *terminology Fraktion* dan kemudian berkembang pula di Swiss. Untuk mengorganisir *parliamentary parties* digunakan fraksi sebagai wadah untuk memperoleh dukungan dalam bidang keuangan dan individu personal bagi partai, anggota parlemen serta bergabung di komisi-komisi dewan perwakilan. Disiplin yang diterapkan oleh partai politik dengan menggunakan wadah fraksi sebagai alat kontrol dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “ Fraksi merupakan pengelompokkan anggota konfigurasi partai politik berdasarkan hasil Pemilu, setiap anggota DPRD harus menjadi anggota fraksi, fraksi di bentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi, fraksi di bentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, fraksi di dukung oleh sekretariat dan tenaga ahli, dan juga sekretariat jendral DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi tersebut.

Namun tidak dapat di pungkiri bahwa partai politik juga memiliki andil yang sangat besar dalam mewujudkan pelaksanaan demokratisasi suatu negara. Begitu juga dengan partai demokrat partai ini juga memiliki tujuan untuk

menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan suatu Negara Republik Indonesia sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan serta untuk mewujudkan cita-cita NKRI.

Namun demikian tidak sesuai dengan apa yang di harapkan seperti yang dijelaskan di atas, dan secara teoritis fraksi memang sebagai tempat pengaduan dan penyampaian permasalahan yang ada di kalangan masyarakat. Ruang fraksi ibarat ruang praktek advokat, karena segala macam surat dan pengaduan, masyarakat datang ke ruang fraksi untuk mengadukan nasibnya, terutama menyangkut keadilan, pendidikan dan lain sebagainya.

Namun kenyataannya hal ini belum menjadi tradisi yang rutin bagi fraksi ini, Sehingga masih banyak kelalaian ataupun kekurangan fraksi dalam melayani ataupun dalam hal sikap mereka masih kurang tanggap ketika ada yang mengadu permasalahannya ke fraksi tersebut. Hal ini disebabkan karena ruang fraksi sering sunyi, dalam hal ini yang berarti ketika menjumpai anggota dewan jarang ada di fraksi tersebut tetapi ada di komisi masing-masing. Fraksi tersebut sering bertindak lamban dalam memperjuangkan tuntutan warganya., seberapa jauh beliau mampu mengemban fungsinya sebagai anggota yang terhormat dengan predikat wakil rakyat.

Dari latar belakang di atas menunjukkan bahwa Peranan Fraksi partai tidak sesuai dengan yang diharapkan yang seharusnya mereka lebih berperan aktif lagi dalam menjalankan tugasnya tersebut, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sudah di jabarkan di atas dengan judul “ **Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut Gunawan (2015 : 203) perumusan masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan yang masih memberi kelonggaran dan kebebasan untuk menggali fenomena secara luas, dan belum sampai menegaskan mana saja variabel yang berhubungan dengan ruang lingkup masalah dan mana yang tidak. Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Fraksi Partai Demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat Fraksi Partai Demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin di capai oleh peneliti, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

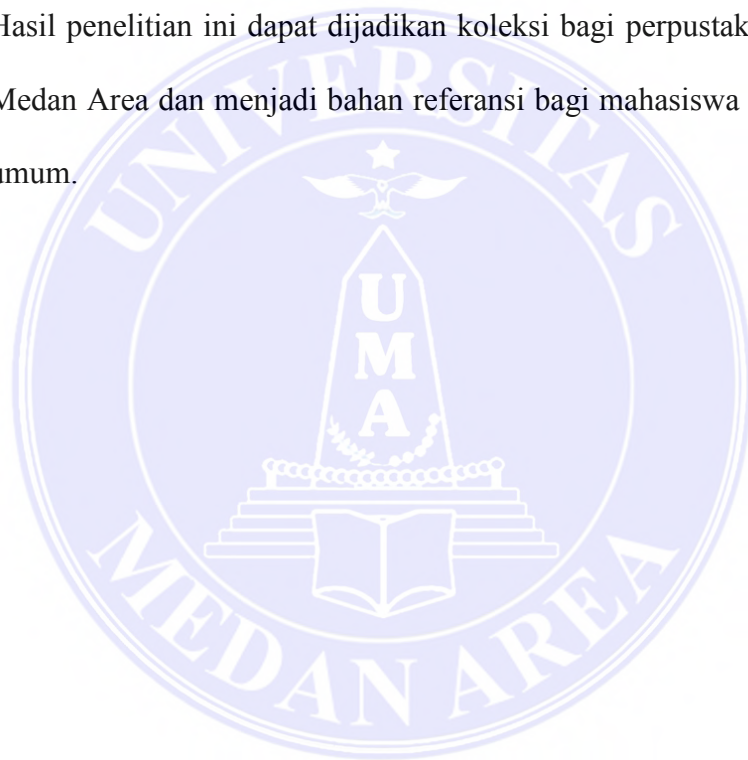
1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi faktor penghambat fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun pihak lainnya sebagai referensi untuk melakukan penelitian kedepannya.

2. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Administrasi Publik khususnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan atau perbaikan bagi fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara agar lebih baik lagi melakukan tugas dan fungsinya.
4. Memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat digunakan untuk membantu melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis ataupun relevan.
5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan koleksi bagi perpustakaan Universitas Medan Area dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Kata “peran” berarti kedudukan (status), ialah sesuatu tingkatan eksistensi yang merupakan sumber bagi timbulnya peranan-peranan tertentu, sedangkan “Peranan” berarti suatu “Fungsi” (*role*), ialah suatu kegunaan diri, baik dalam arti kegunaan diri seseorang bagi dirinya sendiri maupun kegunaan diri orang itu bagi orang lain. Kegunaan diri seseorang bagi orang lain di sebut dengan istilah “Kewajiban”.

Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi atau pemerintahan mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.

Rivai (2004:148).

Menurut Miftah Thoha bahwa suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada perenan publik untuk mencapai tujuan. Herbani Pasolong (2007:53).

Peranan juga dapat dijelaskan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pengembangan dan pembinaan adalah beberapa bentuk dari peranan didalam sebuah kedudukan. Pengembangan dan pembinaan terhadap instansi atau pemerintahan itu sendiri dilakukan sebagai salah satu wujud dari fungsi dan peranan suatu instansi tersebut dalam usaha meningkatkan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Soejono Soekanto (2012:212).

Menurut Soejono Soekanto (1992:238) peranan seseorang dapat disebutkan menjadi beberapa bentuk meliputi:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini di artikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Peran atau peranan didefinisikan juga oleh Gross, Mason, dan Mc. Echern sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dengan kata lain dalam peran atau peranan terdapat dua macam harapan, yaitu :

- 1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- 2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Uraian tersebut dapat diartikan bahwa peran dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat, misalnya dalam pekerjaan keluarga, dan kekuasaan sehingga peran merupakan wujud dari aktivitas-aktivitas seseorang atau lembaga yang mempunyai pengaruh terhadap orang lain atau lingkungannya. Sementara menurut Duverger, peran ialah atribut sebagai akibat dari status dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya peran adalah aspek dari status. Dan demikian yang dimaksud dengan “Peran fraksi” di sini ialah suatu kedudukan atau tingkatan eksistensi (kehadiran) fraksi yang memberikannya peranan-peranan tertentu dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan partai. Iswanto (2013 : 6).

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan

tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjukkan fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat ;
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat ; dan
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan juga dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi ;
2. Pewarisan tradisi; kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dari jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memegang lebih dari satu peranan, tidak hanya peranan bawaan saja, tetapi juga peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri maupun peranan yang ditunjuk oleh pihak lain.

2.2 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan keluaran yang di hasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Menurut Mangkunegara (2004:151), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja juga bisa diartikan sebagai hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik atau material Nawawi (2005:234).

Sedangkan menurut Sutrisno (2009:151), kinerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Kinerja karyawan merupakan hasil sinergi dari sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor lingkungan internal organisasi, faktor lingkungan eksternal, dan faktor internal karyawan.

Menurut Wirawan (2015:55), indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas

Kualitas kerja di ukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang di hasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.

2. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang di hasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas di selesaikannya pekerjaan dalam waktu tertentu yang sudah ditetapkan sebagai standar pencapaian

waktu penyelesaian pekerja dilihat dari sudut koordinasi dengan output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Kerja sama

Pegawai mampu bekerja sama dengan sesama rekan kerjanya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh organisasi atau instansi.

5. Inisiatif

Pegawai mempunyai kemampuan dalam mengerjakan tugas dan mempunyai inisiatif.

6. Komitmen kerja

Komitmen merupakan sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi menurut Mangkunegara adalah sebagai berikut :

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.
2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi
3. Memiliki tujuan yang realistis.
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya.
5. Memanfaatkan umpan balik (*feed back*) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya.
6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

2.3 Pengertian Partai Politik

Menurut Mark N. Hogopain (2013:123) partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dengan demikian, basis sosiologis setiap partai politik adalah adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangannya dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Dengan kata lain, partai politik merupakan organisasi politik yang berorientasi pada upaya untuk merebut dan mempertahankan serta menjalankan kekuasaan dalam bentuk kebijakan umum. Dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya, di negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik berhadapan satu sama lain.

Dari pendapat ahli tersebut, tampak bahwa partai politik dapat menjadi alat dan sarana untuk mendapatkan kekuasaan di parlemen ataupun pemerintahan dengan cara menarik simpati rakyat untuk memilih partai tersebut agar memenangkan pemilu. Semakin banyak simpati dan dukungan rakyat, semakin besar pula kesempatan partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai. Jika tidak, partai tersebut akan di tinggalkan oleh pendukungnya.

Menurut Syafiie (2013:103) partai politik adalah dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

2.3 Tujuan Partai Politik

Menurut Setiadi dan Kolip (2013:290) tujuan partai politik di bagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. Partai perwakilan kelompok, yaitu partai yang menerima sistem kepartaian kompetitif dan berusaha menenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen. Misalnya, partai UMNO di Malaysia serta PDIP dan Golkar di Indonesia.
2. Partai bertujuan menciptakan kesatuan identitas nasional, dan biasanya menindas kepentingan sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.
3. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.

2.3.1 Fungsi Partai Politik

Menurut Setiadi dan kolip (2013:282-286) secara sekilas telah dikemukakan beberapa fungsi partai politik dalam suatu sistem politik. Di bawah ini akan diuraikan secara lebih terperinci fungsi partai politik, khususnya dalam sistem demokrasi.

1. Pelaksana pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan proses dengan di mana para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik masyarakat dan negaranya. Atau dapat pula dirumuskan sebagai proses melalui para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

2. Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum, dan dalam memilih pemimpin-pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang di maksud adalah mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum, dan memilih para wakil rakyat dalam pemilihan umum. Di sini partai politik mempunyai fungsi mengajak, mendorong, menunjukkan kesempatan, dan mengikutsertakan anggota masyarakat dalam proses politik.

3. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok aktor politik untuk menduduki dan menjalankan peranan politik tertentu baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, seperti untuk menjadi anggota DPRD/DPR, menteri, direktur jenderal, gubernur, rektor, dekan, bupati, kepala desa, pimpinan partai, dan pimpinan kelompok-kelompok kepentingan. Partai politik mempunyai salah satu fungsi untuk menyeleksi dan memilih atau mengangkat seseorang atau beberapa orang anggotanya atau anggota masyarakat lainnya untuk menduduki dan melaksanakan peranan politik tertentu dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

4. Pemaduan kepentingan

Pemaduan kepentingan ialah proses di mana berbagai aspirasi dan kepentingan dalam masyarakat ditampung, dianalisis, dan dipadukan ke dalam berbagai alternatif kebijaksanaan umum untuk kemudian di perjuangkan dalam proses pembuatan keputusan politik.

5. Mencari dan mempertahankan kekuasaan

Untuk memperjuangkan alternatif kebijaksanaan umum yang telah dipadukan oleh suatu partai politik, maka partai politik yang bersangkutan berusaha mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan baik dalam badan legislatif maupun dalam badan eksekutif baik lewat pemilihan umum maupun dengan cara lain yang sah. Tanpa adanya kekuasaan itu, partai politik yang bersangkutan tak akan dapat memperjuangkan alternatif kebijaksanaan umum tersebut. Kalau telah mendapatkan kekuasaan, maka partai politik yang bersangkutan biasanya berusaha mempertahankan kekuasaan itu, bahkan mungkin akan berusaha menambahnya. Dalam rangka fungsi ini partai politik melaksanakan tiga kegiatan yaitu seleksi calon-calon dalam pemilihan umum, melaksanakan kampanye dan atau usaha-usaha memengaruhi, dan mengontrol pemerintahan. Adakalanya fungsi inilah yang mengedepan dalam kehidupan politik dengan melalaikan fungsi-fungsi lainnya.

6. Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik dalam hal ini berfungsi sebagai komunikator politik untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat kepada pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Sebaliknya, hal itu juga menyampaikan segala keputusan dan penjelasan dari pemerintah kepada anggota masyarakat. Dengan demikian, terjadilah proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan partai politik berperan sebagai perantara atau jembatan. Sehubungan dengan fungsi ini, partai politik tidak sekedar menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah atau dari masyarakat, akan tetapi merumuskannya sedemikian rupa sehingga pihak penerima informasi (pemerintah atau masyarakat) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkannya.

7. Pengendali konflik

Pengendali konflik adalah mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian yang bersifat fisik. Dalam negara demokrasi, setiap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan kepentingannya, serta berhak pula memperjuangkannya. Dengan demikian, dalam negara demokrasi, dimungkinkan adanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan antar-anggota atau kelompok masyarakat. Akan tetapi, sudah tentu suatu sistem politik hanya akan memperkenankan atau mentoleransi konflik yang tidak menghancurkan

dirinya sendiri. Jadi, persoalan yang di hadapi negara demokrasi adalah bukannya menghilangkan konflik melainkan mengendalikan konflik itu sehingga terciptalah keseimbangan konflik dengan konsensus. Partai politik dalam hal ini berfungsi untuk mengendalikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, yaitu dengan menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik, dan mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, dan mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk kemudian mencari penyelesaiannya lewat mekanisme politik itu (badan perwakilan rakyat dan pemerintah) merupakan konsensus yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

8. Pembuatan keputusan politik

Partai politik dapat bertindak sebagai pembuat keputusan politik, apabila partai politik tersebut menang dan menduduki posisi mayoritas di DPR atau parlemen, sehingga dengan demikian mereka juga akan menduduki posisi kunci pada badan eksekutif. Hal ini dapat dilihat misalnya di negara-negara yang menganut sistem kabinet parlementer, seperti Inggris, Australia, Jepang, Jerman Barat, dan Negeri Belanda. Yang membuat keputusan politik di Jepang misalnya adalah partai liberal demokrat yang selama bertahun-tahun menguasai parlemen.

9. Kontrol politik

Kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam suatu kebijaksanaan atau dalam pelaksanaan suatu kebijaksanaan. Dalam melakukan suatu kontrol atau

pengawasan haruslah berdasarkan kriteria atau norma, sehingga kegiatan itu objektif sifatnya. Melakukan suatu kegiatan kontrol atau pengawasan tanpa suatu kriteria yang jelas, maka kontrol itu tidak akan mempunyai arah atau *ngawur*. Kriteria suatu kontrol politik adalah nilai-nilai politik yang di anggap ideal oleh masyarakat (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijaksanaan umum atau peraturan perundang-undangan. Partai politik memiliki salah satu fungsi untuk melakukan kontrol politik tersebut. Tujuan suatu kontrol politik adalah meluruskan kebijaksanaan atau pelaksanaan kebijaksanaan yang menyimpang, dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijaksanaan dan pelaksanaan suatu kebijaksanaan sejalan dengan ideologi nasional.

2.3.2 Klasifikasi Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2014:84) Klasifikasi partai politik dapat dilakukan dengan berbagai cara bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi:

a. Partai Massa

Partai ini mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama. Kelemahan dari partai ini adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang menjadi anggotanya cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, sehingga persatuan partai menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru.

b. Partai Kader

Kekuatan partai ini adalah terletak pada keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjadi kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan seleksi terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

2.3.3 Ciri-ciri Partai Politik

Menurut Setiadi dan Kolip (2013:280) partai politik itu sekedar mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan dan melakukan kegiatan untuk menarik dukungan dari para pemilih dalam pemilihan umum atau cara lain untuk mendapatkan dukungan umum.

Maka yang terjadi ciri-ciri partai politik adalah :

1. Berakar dalam masyarakat lokal.
2. Melakukan kegiatan secara terus-menerus.
3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam mempertahankan dan.
4. Ikut sebagai konstestan atau peserta dalam pemilihan umum.

Berdasarkan ciri-ciri ini, maka suatu organisasi yang tidak berakar di tengah-tengah masyarakat, tidak mempunyai cabang-cabang di daerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan secara kontinu, tidak ikut dalam pemilihan umum, dan tidak mempunyai wakil parlemen, tidaklah dapat di sebut sebagai partai politik. Sebab dengan memenuhi persyaratan itu, organisasi politik yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan fungsinya untuk menampung dan memadukan

berbagai kepentingan dalam masyarakat dan memperjuangkannya ke dalam proses pembuatan keputusan (lembaga legislatif dan eksekutif).

2.4 Pengertian Fraksi

Istilah Fraksi merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk *political group/party group* yang ada diparlemen. Istilah lain selain fraksi, juga sering digunakan istilah *faction, club, group*, dan sebagainya. Dalam pengertian fraksi terkandung maksud adanya “elemen disiplin partai, partai harus dihormati. Anggota-anggota di dalam partai harus menyampaikan hal-hal yang menjadi kebijakan partai, mereka yang tidak mengindahkan kebijakan partai terancam posisinya. Kalau disiplin partai yang akan di pegang maka keberadaan fraksi itu penting.” Di dalam Kamus Politik yang di tulis oleh B.N Marbun bahwa kata *fraksi di terjemahkan sebagai kelompok orang yang mempunyai dan memperjuangkan suatu aliran politik dalam parlemen atau dewan-dewan perwakilan*. Juga di terjemahkan sebagai *bagian kecil; pecahan*. dikenal sejak periode DPR sementara tahun 1950.

Sekalipun istilah “aliran” juga dikenal pada masa itu, namun istilah fraksi sudah di muat pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) peraturan tata tertib (tatib) DPR Sementara. Pelaksanaan representasi suara rakyat dalam prakteknya di Indonesia, dilaksanakan oleh fraksi-fraksi di DPR. Fraksi dipandang sebagai kepanjangan tangan partai politik di tubuh DPR, sementara anggota DPR dipilih melalui partai politik. Menurut Tata Tertib Pasal 1 Angka 7 fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Di kutip dari jurnal Iswanto (2013:5).

Fraksi merupakan representatif dari partai politik sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki tugas dan peran sangat menentukan. Fraksi memberikan sikap politik dalam tatanan penggunaan hak bertanya dan menyampaikan pendapat berdasarkan ketentuan musyawarah dan mufakat. Persoalan penghapusan fraksi dari tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlihat dari keberadaan fraksi di nilai sangat penting karena perpanjangan dari partai politik. Jika fraksi di hapus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka akan terlihat bahwa peran partai politik akan tidak jelas. Kepentingan masyarakat tidak akan tersalurkan melalui fraksi tetapi bila fraksi dihapuskan akan nampak dominasi peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mewakili daerah pemilihan.

Adapun tugas dari fraksi, sebagai berikut :

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing.
2. Meningkatkan kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dalam setiap kegiatan.
3. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Warman (2014:2-3) tugas fraksi hanya dalam ruang lingkup internal yang berhubungan dengan keanggotaan partai politik dan menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat, tugas yang sangat penting dalam menjalankan mesin partai. Sementara itu di parlemen, para anggota dewan dikelompokkan dalam fraksi setiap anggota harus menjadi anggota fraksi. Fraksi merupakan pengelompokan anggota dewan berdasarkan konfigurasi partai. Menurut Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja anggota legislatif selaku wakil rakyat. Fraksi berfungsi sebagai *think thank* kerja anggota dewan fraksi menjadi wadah konsolidasi, kordinasi dan evaluasi kinerja para anggotanya. Melalui fraksi inilah kepentingan partai politik dan aspirasi masyarakat umum dan konstituen partai politik disalurkan oleh para anggota dewan dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu fraksi juga memiliki program kerja dan anggota dewan harus bekerja secara serius dalam mewakili fraksinya dan mewakili rakyatnya.

Fraksi mempunyai peran yang sangat startegis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi dewan di DPRD. Dukungan peran dan kinerja yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan fungssi-fungsi anggota dewan dalam bidang legislasi. Mulai dari tahap awal penyaringan aspirasi dan turun ke daerah-daerah pada masa resesnya menghasilkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) hingga pembahasan sampai penentuan keputusan legislasi melibatkan peran fraksi.

Keberadaan fraksi selain sebagai perwakilan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat juga menjadi salah satu bagian kecil dari sebuah sistem organisasi pemerintah karena menjalankan fungsi pemerintah di antara legislatif untuk masyarakat. Fraksi harus memiliki kinerja yang baik sehingga pekerjaan yang di laksanakan nya harus dipastikan membawa manfaat dan sesuai dengan fungsinya. Oleh karenanya fraksi juga harus diukur sejauh mana kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pengaturan atau landasan hukum fraksi di DPR di atur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan juga di atur di

satu pasal di dalam UU partai politik. Peranan atau fungsi utama dari fraksi berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah sebagai fungsi control dari setiap partai politik yang diwakilinya di samping sebagai fungsi pengelompokan dan perwakilan anggota parlemen menurut partai asalnya sebagai penyeragaman pendapat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif itu sendiri.

Sedangkan definisi tentang fraksi tidak dapat di temukan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun dalam prakteknya dapat kita simpulkan bahwa fraksi itu adalah penggelompokan anggota legislatif dengan latar belakang 1 (satu) partai atau di latarbelakangi dengan kesamaan ide (khusus fraksi gabungan). Sehingga fraksi di anggap sebagai etalase partai politik, dimana bisa dijadikan parameter evaluasi kinerja partai dengan pendapat dan sikap yang dikeluarkan oleh fraksinya yang berada di legislatif. Di kutip dari jurnal Yuswanto (2016:9).

2.5 Pengertian Badan Legislatif

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang membuat undang-undang yang anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada (termasuk yang berdomidili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum yang termasuk di dalamnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di jelaskan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pengertian DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

DPRD adalah lembaga legislative atau membuat peraturan, perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. DPRD juga disebut institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Keberadaan lembaga legislatif diwakili dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala negara. Keinginan tersebut yang akhirnya memunculkan pusat kekuasaan masyarakat yang mendapat legitimasi dan melemah dalam lembaga legislatif. Dalam DPRD terdapat kursi untuk partai politik, fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang memiliki fungsi sangat penting dalam terselenggaranya otonomi daerah. Di kutip dari jurnal Anggraeny (2016: 33-34).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai organisasi publik, senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan responsibilitas dalam pencapaian tujuan. Mempertegas hal ini bahwa organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena lingkungan dimana

organisasi ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan kegiatan masyarakat.

Perubahan tujuan ini akan menjadi pedoman, referensi dan sekaligus mengukur kinerja organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut, menegaskan bahwa di dalam organisasi yang berusaha untuk menjadi lebih kompetitif dan adaptif, tujuan utama harus pada upaya mendorong semangat kerja sendiri di antara para kelaennya atau di dalam masyarakat di mana iya saling berhubungan. Di kutip dari jurnal Ramliadi (2016 :4-5).

2.5.1 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Ada dua peran utama dari DPRD, pertama badan legislatif adalah badan pembuat undang-undang. Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Kedua, lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan nasional. Di kutip dari jurnal Anggraeny (2016: 35).

Terdapat pada peraturan DPRD Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang tatib DPRD Provinsi Sumatera Utara yang juga membahas tentang fungsi DPRD yang dijelaskan pada pasal 4 yaitu pembentukan Perda Provinsi, anggaran dan pengawasan. dimana fungsi pembentukan perda provinsi dilaksanakan dengan cara menyusun pembentukan perda bersama Gubernur membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda provinsi juga pemerintah daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi yang di ajukan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2014:65) kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen bila dalam penelitian ada moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian pertautan antar variabel tersebut. Selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian harus di dasarkan pada kerangka berfikir.

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*) yang artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya.

Kinerja (*prestasi kerja*) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan

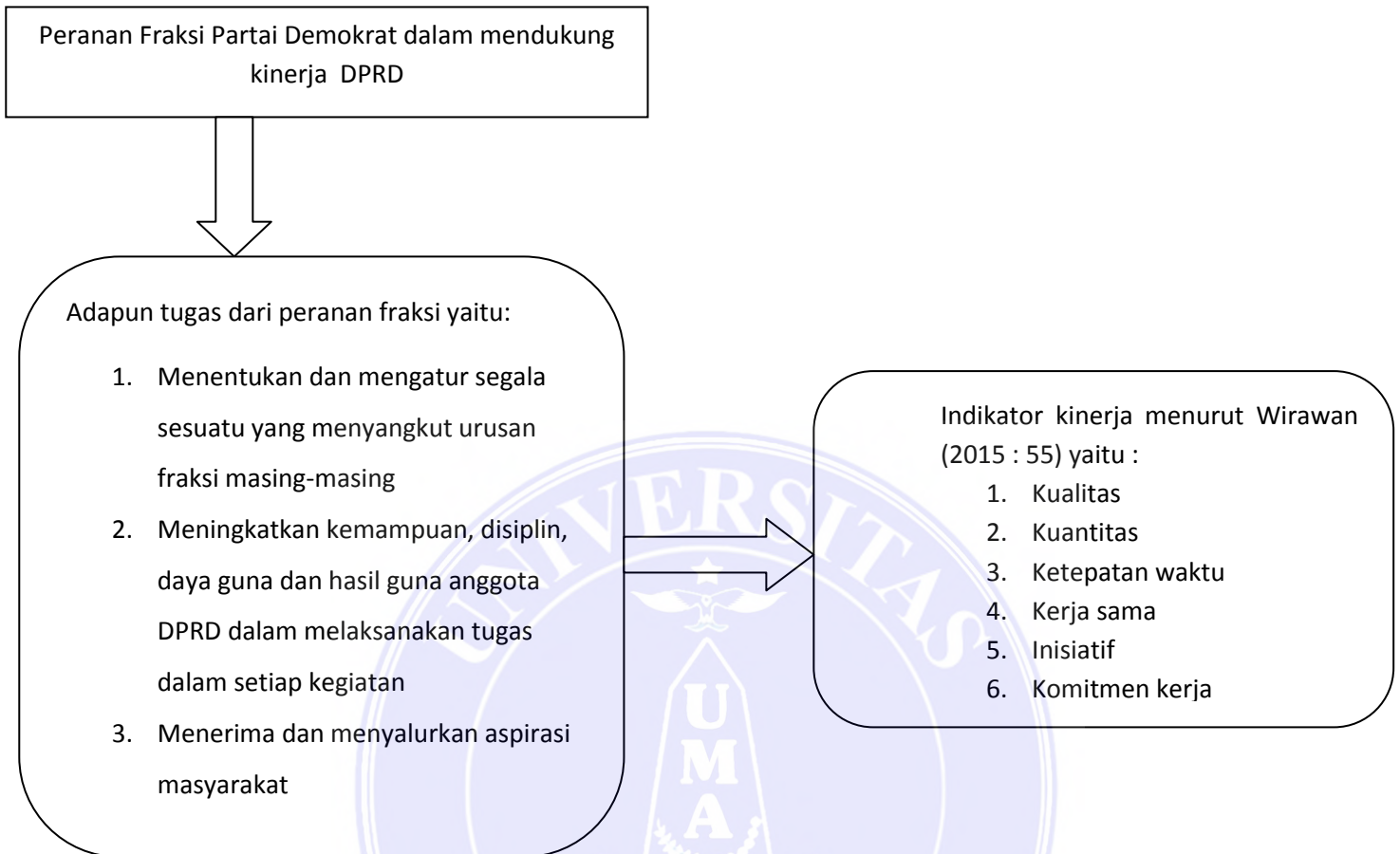
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. partai politik sebagai organisasi resmi diakui pemerintah, dan ikut pemilihan umum.

Partai politik adalah penghubung antara pusat kekuasaan dengan lokalitas (warganegara yang tersebar di aneka wilayah, agama, ideologi, dan sejenisnya). Partai politik berfungsi untuk menempatkan orang-orang (kandidat) bagi sebuah jabatan publik.

Fraksi merupakan pengelompokan anggota dewan perwakilan rakyat baik ditingkat pusat maupun daerah yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Dalam sistem perwakilan di Indonesia, setiap anggota dewan harus menjadi anggota salah satu fraksi.

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang membuat undang-undang yang anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum yang termasuk di dalamnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di jelaskan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pengertian DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam skripsi ini penulis membuat kerangka pemikiran dalam bentuk seperti pada bagan 1 di bawah ini:

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



2.7 Penelitian Relevan

Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul Peran Fraksi Kebangkitan Bangsa Di DPRD Kabupaten Sumenep Periode 2009-2014 volume 4, Nomor 1, April 2014 oleh: Kusliyaturun.

Artikel jurnal ini membahas tentang Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya setiap negara. sedangkan Legislatif dalam terminologi fiqih disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa. Secara harfiah Ahl al-Halli wa al-’aqd berarti orang yang dapat memusatkan dan mengikat.

Di Indonesia disebut dengan DPR Republik Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia) untuk tingkat pusat dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk tingkat daerah, baik tingkat I dan tingkat II. Membicarakan legislatif di tingkat daerah terlebih dahulu mengetahui bagaimana letak legislatif daerah dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kemudian apa landasan hukum legislatif daerah serta bagaimana susunan, cara kerja, dan peranannya dalam sistem dan struktur pemerintah di Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan Indonesia atau disebut juga sub bagian dari sistem pemerintahan Negara Indonesia. Dalam pemerintahan Islam di perlukan adanya sebuah lembaga musyawarah, sejarah Islam mengenalkan lembaga itu dengan istilah Ahl al-Hal Wa al-Aqd dalam konsep kenegaraan Indonesia dikenal dengan MPR dan DPR. Jika musyawarah maksudnya adalah partisipasi politik dalam pemikiran politik barat, jika pemikiran politik barat pada dasarnya adalah persoalan etika, yang menjadi inti dari tradisi pemikiran barat tersebut adalah konsepsi manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kebebasan dan kehendak menentukan dirinya. Dalam pandangan barat, yang berhak menetapkan nilai-nilai moral adalah akal dan kehendak manusia. Dalam Islam didominasi oleh perdebatan tentang sistem pemerintahan atau Penelitian ini mencoba membahas bagaimana peran DPRD Kabupaten Sumenep. Akan tetapi penelitian hanya memfokuskan pada salah satu fraksi saja, yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang mendominasi di DPRD Kabupaten Sumenep. Di mana anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep berjumlah 12 (dua belas) kursi. Beberapa periode

PKB selalu meraih suara terbanyak mulai 1999, 2004, dan 2009. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep yang mana perannya cukup mewakili anggota fraksi lainnya di DPRD secara keseluruhan.

DPRD dengan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang erat meski dalam UU. Nomer 27 tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintahan mempunyai wilayah kerja dan fungsinya masing-masing, akan tetapi kerja sama dan kemitraan antara DPRD dan pemerintahan daerah harus tetap terjaga, karena bagaimanapun fungsi yang di jalankan mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk mensejahterakan rakyat.

Hal ini merupakan posisi yang sangat menguntungkan bagi DPRD yang menjadi mitra pemerintah daerah agar tercipta hubungan kerja yang harmonis. Adapun peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumenep bersumber dari UU.No.27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu pasal 341 dan pasal 342 di sebutkan: Pasal 341: DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 342: DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupatean/kota.

Secara teknis masih terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menjamin kewenangan dan fungsi-fungsinya tersebut secara efektif. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi-fungsi tersebut yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah yaitu DPRD harus mampu menciptakan

check and balance supaya pelaksanaan pensejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, kepada DPRD disamping di berikan tugas, wewenang dan hak-hak juga diberikan fungsifungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan yang sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam ruang lingkup sebagai Lembaga Legeslatif Daerah. Dengan diberikan fungsi tersebut, dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitra sejajaran dengan Lembaga Eksekutif dalam menyusun anggaran, menyusun dan menetapkan berbagai Peraturan Daerah, serta dari sisi kontrol adalah sejauh mana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau kebijakan publik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, upaya penulis di sini untuk dapat menjelaskan peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep yang akan dianalisa melalui fiqh siyāsah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian sangat penting dalam setiap penelitian yang dilakukan, karena dengan menetapkan atau cara yang di gunakan dalam penelitian maka akan memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah yang ada.

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang di tempuh sehubungan dengan penelitian yang di lakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Menurut Sugiyono (2014:6) menyatakan bahwa metode penelitian dapat di artikan secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan, dan di buktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian ini dipilih karena dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi. Moleong (2000:183).

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menganalisa tentang Peranan dari fraksi partai demokrat dalam

mendukung kinerja DPRD pada kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, karena pada penelitian ini peneliti berusaha menemukan data yang berkenaan dengan peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Sugiyono (2014:205).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di jalan Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231.

1.3 Waktu Penelitian

Penelitian di laksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018 yaitu antara September 2018 sampai dengan maret 2019 dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 target penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2018-2019							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mrt	Aprl
1.	Penyusunan dan pengajuan judul								
2.	Pengajuan dan Penyusunan proposal								
3.	Seminar proposal								
4.	Perbaikan proposal								
5.	Penelitian								
6.	Penyusunan Skripsi								
7.	Seminar Hasil								
8.	Perbaikan Skripsi								
9.	Sidang Meja Hijau								

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan yang menjadi objek penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu informan utama dan informan kunci.

Informan yang ditentukan pada penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. Alasan penulisan menggunakan penentuan informasi secara *purposive sampling* agar informasi yang didapat lebih akurat dan aktual maka informan dimaksud haruslah mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai objek kajian yang diteliti. Dalam konteks ini, informan sebagaimana dijelaskan di atas ditentukan secara *purpose sampling* yaitu berdasarkan pemikiran logis informan sengaja dipilih oleh peneliti guna memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Informan utama adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan informan kunci adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Adapun informan penelitian ini meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu Ketua Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara.

2. Informan Utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu sekretaris Fraksi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara.
3. Informan Tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan yaitu Anggota Dewan tersebut yang merasa dibantu atau di dukung dalam kinerjanya.

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengupulkan data untuk diteliti yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara mendalam (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Teknik pengumpulan data tentang peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD ini dilakukan wawancara dengan narasumber yang relevan.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjangkau data yang di perlukan guna melengkapi data dari wawancara. Menurut Sutopo dalam Harsono (2008:164), observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti berperan aktif dalam lokasi studi sehingga benar-benar terlihat dalam kegiatan yang ditelitinya. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi dipakai untuk memahami persoalan-persoalan yang ada di sekitar pelaku dan narasumber Harsono (2008:165).

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non lisan, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman, surat kabar, foto-foto, dan lain sebagainya. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada ditempat atau lokasi penelitian.

- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat dari para ahli yang berkompentensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.6 Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti, wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrument. Instrument yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk *recorder*, pensil, *ballpoint* dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting dalam bentuk foto sebagai bukti penelitian. *Recorder*, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara. Sedangkan pensil, *ballpoint*, buku. Buku gambar digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang di dapat dari narasumber. Wawancara yang dilakukan peneliti meliputi apa saja fokus kajian yang diteliti yaitu mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian tersebut.

3.7 Teknik Analisa Data

Menurut Harsono (2008:166), analisis data mempunyai posisi strategis dalam suatu penelitian. Namun perlu di mengerti bahwa dengan melakukan analisis tidak dengan sendiri dapat langsung menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Menginterpretasikan berarti kita menggunakan hasil analisis guna memperoleh arti ataupun makna. Sedangkan interpretasi mempunyai dua arti yaitu sempit dan luas arti sempit yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang di teliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan yaitu guna

mencari makna dan hasil penelitian tersebut. Sedangkan interpretasi dalam arti luas yaitu guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan intervensi dari data diperoleh dengan teori yang relevan penelitian tersebut.

Menurut Miles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi berikut tahapan dalam analisis data tertata, pertama, membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu Miles dan Huberman (2007:173-174).

Kedua, memasukkan data pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.

Ketiga, menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Menurut Nasution Dalam Buku Sugiyono (2014:236), menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analiysis interactive model* dari Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2014:246) yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan

data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Menurut Mantja dalam buku Harsono (2008:169), reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo dalam buku Harsono (2008:169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi Harsono (2008:169).

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumentasi, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
2. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
3. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung antara lain metode, skema, bagan, tabel dan sebagainya.
4. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
5. Kesimpulan sementara tersebut akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi interaksi yang terus-menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.

6. Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya:

- a. Melengkapi data-data kualitatif
- b. Mengembangkan prinsip *intersubjektivitas*, melalui diskusi dengan orang lain.

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Pengertian keabsahan data adalah pengujian data untuk menilai kebenaran dan keabsahan penelitian dengan analisis kualitatif. Hasil dari uji ini akan menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Pada penelitian ini peneliti akan membahas terkait dengan cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan data hasil kualitatif dilakukan dengan beberapa pendekatan.

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan penelitian berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan antara peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan yang semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, semakin mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terjadi rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

2. Teknik Triangulasi (*triangulation technique*)

Teknik triangulasi (*triangulation technique*) adalah proses penguatan buku dari beberapa sumber dalam penelitian yang berada dari setiap penelitian. Dalam penelitian ini penguatan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi namun tekniknya tidak berbeda dengan teknik pengamatan sebelumnya (pra penelitian).

3. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila ditemukan oleh para pemberi data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsiran tidak disepakati oleh para pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah semuanya, dan harus menemukan dengan apa yang diberikan oleh si pemberi data.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memperoleh kesimpulan yang disesuaikan dengan tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah :

1. Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara secara umum memberikan manfaat yang baik kepada anggota dewan dalam meningkatkan kinerja mereka melalui bantuan fraksi guna untuk mengoptimalkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat dilihat dari peranan fraksi dan kinerja yang telah dijelaskan oleh peneliti.
2. Hambatan Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu tentang ketepatan waktu masih kurangnya disiplin khususnya dalam waktu, baik itu pegawai maupun anggota dewan sesuatu yang akan dilaksanakan selalu mengalami keterlambatan, baik dalam hal apapun. Contohnya ketika mereka akan menghadiri rapat ataupun hal lainnya, dengan adanya fraksi ini semua kerja anggota dewan terdukung dan terbantu karena yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang anggota dewan yang ikut andil ialah fraksi dan pegawai staffnya. Oleh sebab itu, fraksi memiliki pengaruh besar dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan dapat mengoptimalkan segala urusan yang menyangkut dengan anggota dewan.

5.2 Saran

Setelah melihat uraian dari hasil penelitian diatas maka peneliti memiliki beberapa saran yang membangun, untuk kemajuan fraksi dalam mendukung kinerja dewan perwakilan rakyat daerah yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membentuk opini yang sehat di media dibutuhkan strategi yang baik agar dapat memberikan informasi-informasi tentang anggota dewan dengan baik pula.
2. Meningkatkan kedisiplinan waktu seharusnya fraksi lebih mengingatkan kembali kepada para dewan agar tidak memakan waktu yang lama dalam melakukan pertemuan karena tingkat kedisiplinan itu penting.
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan lainnya dalam bekerja agar fraksi lebih ter upgrade kedepannya lebih menjadi produktif dalam setiap hal apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Avianto, Candra, 2010. *Kinerja Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)*. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Surakarta.
- Anggraeny, 2016. *kinerja anggota DPRD perempuan periode 2014-2019 ditinjau dari aspek legislasi* Fisip Universitas Lampung.
- Gunawan, Imam, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamzah, B. uno, dkk, 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Iswanto, Andi, 2014. *Peran Fraksi DPR RI*. Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Depok.
- Kusliyaton, 2014. *Peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep periode 2009-2014*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jurnal hukum dan perundangan.
- Mangkunegara, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Miles, M.B & Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufti, Muslim, 2013. *Teori-Teori Politik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Administrasi Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Setiadi, Elly, dan Kolip, Usman, 2013. *Pengantar Sosiologi edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Syafi'ie , Kencana Inu, 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wirawan, 2015. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba.

Sari, Indah Nur, Ririn, dan Hadijah, Siti, Hady, 2016. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran dengan judul Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja*.

Veithzal, Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Warman, 2014. *Peran Fraksi Dalam pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fisip Universitas Galah Ciamis*.

Yuswanto. 2016. *Jurnal Hukum Volume III nomor 2*. Dengan judul *Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*. Fakultas Hukum Pekanbaru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 82 Tentang Fraksi.

UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPRD.

Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara.

SUMBER LAINNYA

Bapak Drs. Safaruddin Siregar anggota fraksi partai demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

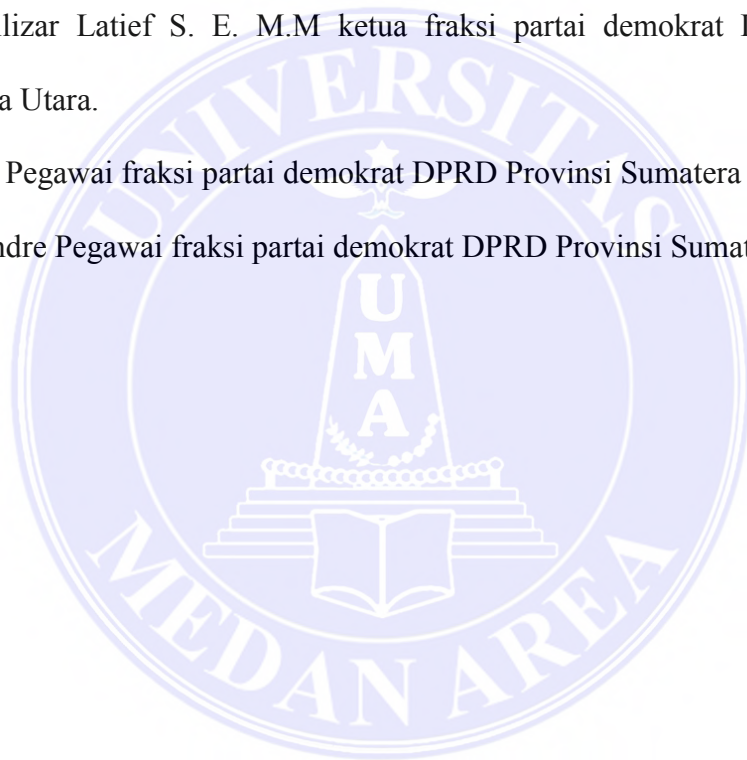
Ibu Lidiani Lase anggota sekaligus bendahara fraksi partai demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bapak H. M. Dahril Siregar sekretaris fraksi partai demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ibu Meilizar Latief S. E. M.M ketua fraksi partai demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kak Siti Pegawai fraksi partai demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bang Andre Pegawai fraksi partai demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara.



LAMPIRAN



Gambar 1.1 Foto bersama anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin 07 januari 2019, Pukul 11.00 Wib.



Gambar 1.2 Foto Bersama bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin 07 Januari 2019, Pukul 11.40 Wib



Gambar 1.3 Foto bersama Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara , senin 07 januari 2019, pukul 13.30 Wib



Gambar 1.4 Foto bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara, senin 07 januari 2019, pukul 15.00 Wib